

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Syaprianto¹, Yogi Oktaris Maryati²,

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau,
Jln. Kaharuddin Nasution No.13 Perhentian MArpoyan, Pekanbaru, Indonesia 90221*

Email: syaprianto@soc.uir.ac.id, yogioktaris@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif, Pengumpulan data menggunakan Teknik Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi telah terlaksana, namun belum terlaksana secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari jumlah sumber daya manusia dalam Implementasi Kebijakan dinilai masih kurang. Disamping itu kesadaran masyarakat untuk mengurus KIA Kartu Identitas Anak (KIA) masih rendah. Maka saran peneliti kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan agar dapat menambah jumlah pegawai yang khusus menangani KIA agar pelayanan dan sosialisasi bisa terlaksana secara maksimal dan perlu menambah jumlah mesin cetak Kartu Identitas Anak (KIA)

Kata Kunci : Implementasi, Kartu Identitas Anak.

Abstract

This research aims to determine the implementation of the Child Identity Card (KIA) Policy at the Population and Civil Registration Service of Kuantan Singingi Regency and to determine the factors inhibiting the implementation of the Child Identity Card program by the Population and Civil Registration Service of Kuantan Singingi Regency. The research method used in this research is qualitative, data collection uses interview techniques, observation, documentation. The results of this research indicate that the implementation of the Child Identity Card (KIA) Policy at the Population and Civil Registration Service of Kuantan Singingi Regency has been implemented, but has not been implemented optimally. This can be seen from the number of human resources in Policy Implementation which are considered to be insufficient. Apart from that, public awareness about managing KIA Child Identity Cards (KIA) is still low. So the researcher's suggestion to the Population and Civil Registration Service of Kuantan Singingi Regency is that it is hoped to increase the number of employees who specifically handle KIA so that services and outreach can be carried out optimally and it is necessary to increase the number of Child Identity Card (KIA) printing machines..

Keywords: Implementation, Child Identity Card

Pendahuluan

Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) mulai dilaksanakan pada tahun 2016 yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak (KIA) telah berkembang menjadi salah satu upaya penerapan tertib kependudukan nasional hingga saat ini. Regulasi yang mendasari pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 angka (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota. Untuk wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Dinas yang bertanggung jawab dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi adalah KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perceraian, akta kematian, akta perkawinan, administrasi penduduk datang, administrasi penduduk pindah, legalisir dokumen kependudukan, penerbitan SKTT, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pada tahun 2019, Kabupaten Kuantan Singingi mulai berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KIA. Bertepatan dengan perayaan hari jadi Kabupaten Kuantan Singingi yang ke-20, peluncuran pertama KIA dilakukan langsung oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuantan Singingi di lapangan Limuno Teluk Kuantan pada tanggal 12 Oktober 2019, dan menyerahkan 20 Kartu Identitas Anak (KIA) secara simbolis.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah mencetak 27.843 kartu identitas anak hingga Tahun 2022. Selain itu, penerbitan Kartu Tanda Penduduk Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Salah satu keunggulan KIA adalah memenuhi hak anak. Pembuatan KIA diharapkan memiliki sejumlah manfaat, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melindungi pemenuhan hak anak
2. Mencegah perdagangan anak
3. Menjadi bukti identifikasi diri ketika sewaktu-waktu anak mengalami kejadian buruk
4. Memudahkan anak untuk mendapatkan pelayanan publik di bidang Kesehatan, Pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi.
5. Menjadi syarat untuk anak mendaftar sekolah, membuka tabungan, dan mendaftar BPJS.

Sesuai dengan Prosedur penerbitan KIA, pemohon akan mengisi formulir yang telah disediakan dan melakukan tata cara sebagai berikut :

1. Pemohon membawa berkas persyaratan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Petugas operator menerima dan memferivikasi berkas yang sudah diajukan oleh pemohon
3. Petugas operator melakukan scan foto anak yang memohon KIA berusia dari 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari
4. Petugas operator mencetak KIA.

KIA memiliki peranan yang cukup penting bagi anak ,walaupun anak-anak sudah memiliki akta kelahiran, namun saat ini belum ada KTP bagi mereka. Namun, akta kelahiran hanyalah dokumen yang menunjukkan tanggal lahir, serta bukti asli kewarganegaraan dan asal usul seseorang. Oleh karena itu Pemerintah mengembangkan program terkait identitas anak. Masih banyak anak yang belum memiliki kartu identitas anak

(KIA) akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya KIA.

Berdasarkan hasil observasi, ada beberapa temuan yang peneliti temui fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan program kartu identitas anak (KIA) di Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi di antaranya sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah pegawai pada Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi yang khusus menangani pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut.
2. Pembuatan Kartu Identitas Anak dikarenakan hanya ada 1 mesin cetak yang dimiliki di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Kerangka Teori

Konsep Kebijakan Publik

Anderson dalam (Agustino, 2014) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut: Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Selanjutnya (Sutopo, 2001) juga menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara yang kemudian akan ditujukan pada kepentingan masyarakat. Dimana kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Selain itu, Thomas R. Dye juga mengatakan

bahwa *policy is a whatever government chooses to do or not to do*, yang artinya kebijakna sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Purnomo & Herman, 2022).

Kebijakan memiliki dua aspek (Thoah, 2012), yakni:

1. Sebuah Kebijakan adalah suatu bentuk praktik sosial; itu bukan peristiwa tunggal. akibatnya pemerintah bertugas merumuskan kebijakan, yang didasarkan pada segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Kejadian ini tidak berdiri sendiri, tidak terisolasi, dan tidak unik bagi masyarakat; sebaliknya, itu berkembang dalam perjalanan kehidupan sosial.
2. Kebijakan merupakan cara untuk menghadapi hal-hal yang terjadi, baik untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih maupun memberikan insentif untuk bekerja sama jika diperlakukan tidak adil.

Kebijakan Publik dapat diimplementasikan melalui membuat undang-undang, menyelenggarakan acara, dan melakukan berbagai intervensi dalam sosial dan ekonomi masyarakat. Karena kebijakan merupakan tindakan sekaligus keputusan yang dibuat oleh pemerintah, bercirikan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan kewenangan pemerintah.

Hakikatnya kebijakan publik di kategorikan oleh (Wahab, 2012) dalam beberapa kategori yaitu:

1. Keluaran kebijakan
2. Pernyataan kebijakan
3. Hasil kebijakan
4. Keputusan kebijakan
5. Tuntutan kebijakan

Konsep Implementasi Kebijakan

Jika dikaitkan dengan kebijakan publik, maka istilah "implementasi kebijakan publik" dapat diartikan sebagai penyelesaian atau pelaksanaan suatu kegiatan kebijakan publik yang telah ditentukan atau disetujui dengan menggunakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Secara etimologis, "implementasi" dapat merujuk pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan

menggunakan sarana (tools) untuk memperoleh hasil.

Tahapan suatu kebijakan publik yang pada akhirnya menentukan keberhasilannya disebut implementasi. Adalah mungkin untuk menentukan apakah suatu kebijakan terkait dengan baik melalui implementasinya. Seluruh tahapan kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia jika tidak dilaksanakan.

Menurut (Nugroho, 2003) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan seperti langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan Sasaran atau tujuan kebijakan, kegiatan atau kegiatan untuk mencapai tujuan, dan hasil kegiatan merupakan komponen-komponen implementasi kebijakan, sebagaimana dapat dilihat dari pengertian di atas. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis dimana suatu kebijakan atau kegiatan dilakukan untuk mencapai suatu hasil yang sejalan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan pada akhirnya. Lebih lanjut menurut Grindle bahwa implementasi (pelaksanaan) adalah *establish a link that allows goals of public policies to be realized as outcome of government a activity* yang dapat diartikan mendirikan sebuah organisasi untuk menjalankan tujuan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah (Nuraplina & Herman, 2018).

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu: Standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap Pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait, Lingkungan social, ekonomi dan politik (Herman et.al, 2022).

Selanjutnya Edwards III dalam (Winarno, 2012) menyatakan bahwa da empat faktor krusial dalam Implementasi Kebijakan publik, faktor- faktor atau variabel-variabel tersebut adalah

Komunikasi, sumber- sumber/ sumber daya, Tingkah laku/ sikap dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah- perintah dan arahanarahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka- mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, untuk itu perlu mamahami arahan penyampaian kebijakan, Tipe komunikasi yang diajukan oleh Edwards termasuk kepada tipe komunikasi vertikal.

Komunikasi vertikal mencakup lima hal:

- a. Petunjuk- petunjuk tugas yang spesifik (perintah kerja);
- b. Informasi dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungannya dengan tugas- tugas organisasi lainnya (rasionalisasikan pekerjaan);
- c. Informasi tentang praktek- praktek dan prosedur keorganisasinnya;
- d. Perintah-perintah;
- e. Arahan-arahan dan pelsanaan yang dikirimkan kepada pelaksanaan yang harus dikirim kepada pelaksana program

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu factor penting dalam mengimplementasikan kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dan program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancer dalam penyampaian dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam dalam mengimplementasikannya. Sumber daya yang dimaksud adalah mencakup jumlah staff pelaksana yanghng memadai dengan

Keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas- fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai denganyang diharapkan. Memadai yang dimaksud adalah jumlah para pelaksana harus sesuai denga jumlah tugas yang dibebankan atau tanggung jawab yang dibebankan maupun

kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki, baik teknis maupun manajerial

3. Disposisi

Menurut (Wahab, 2010). disposisi mengacu pada karakter dan sifat-sifat pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. Jika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang positif, maka besar kemungkinan ia akan melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif. Sebaliknya, jika pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah kebijakan, maka bisa saja proses implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan pertimbangan penting. Kesesuaian organisasi birokrasi yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan publik berkaitan dengan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi. Prosedur standar untuk implementasi kebijakan, juga dikenal sebagai manajemen kebijakan yang jelas, dan koordinasi lembaga yang efektif adalah aspek struktur organisasi yang memungkinkan implementasi kebijakan yang efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (*Qualitative Research*), Berikut metode penelitian kualitatif yang dipaparkan dalam buku (Sugiyono, 2017) Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam kajiannya tentang "implementasi kebijakan kartu identitas anak". Deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu fenomena sosial atau alam merupakan tujuan dari penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang akurat tentang masalah yang akan dibahas. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui lebih dalam proses pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk Anak.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam serta menemukan fakta-fakta dalam proses pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk Anak.

Lokasi Penelitian ini Sesuai permasalahan yang ditemukan penulis, penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi alasan penulis dalam pemilihan lokasi didasarkan karena instansi tersebut yang menangani masalah pembuatan kartu identitas anak di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian yaitu Kepala Bidang Pelayanan Penduduk, Seksi Identitas Penduduk, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dan Orangtua Anak.

Hasil dan Pembahasan

Berikut ini hasil penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

1. Komunikasi

Komunikasi menurut Winarno (2014) adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari komunikator (pemberi informasi atau pesan) kepada komunikan (penerima informasi atau pesan). Agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan baik apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik sehingga maksud dan tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada para pelaku kebijakan tersebut agar mereka dapat mengetahui, memahami, dan mempersiapkan isi kebijakan, tujuan, arah, dan kelompok sasaran. Agar dapat mengkomunikasikan tujuan dan manfaat suatu kebijakan secara efektif, para pelaksana kebijakan harus terlibat dalam berbagai kegiatan.

Program KIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi telah menyampaikan informasi tentang KIA kepada pihak kecamatan dengan

melalui pertemuan dengan mengadakan pertemuan untuk menyampaikan informasi tentang isi dan tujuan KIA dan juga melakukan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat. sehingga, informasi, dan manfaat KIA telah tersampaikan secara optimal.

Informasi mengenai KIA yang diberikan oleh Disdukpencahil Kabupaten Kuantan Singingi kepada masyarakat sudah jelas dan berjalan dengan baik. Namun untuk saat ini kesadaran masyarakat lah yang masih rendah hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah anak-anak yang memiliki KIA. Sehingga dinilai belum maksimal.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan publik antara lain staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya.

Ketika proses mewujudkan program atau kebijakan, sumber daya memainkan peran penting. Salah satu aspek krusial yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan adalah ketersediaan sumber daya. Hal ini memastikan bahwa kebijakan akan dimasukkan ke dalam tindakan seperti yang direncanakan. Dari segi kuantitas maupun kualitas, sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Jumlah sumberdaya manusia untuk pendukung program KIA di Disdukpencahil Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang dan perlu ditingkatkan baik jumlah sumberdaya nya maupun kompetensi yang dimiliki oleh pegawainya.

3. Disposisi

Disposisi (Syaprianto, 2018) adalah Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini sering dengan apa yang dikemukakan oleh Meter dan Horn diartikan sebagai motivasi Psikologis aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Selanjutnya menurut (Wahab, 2010) merupakan faktor yang berhubungan dengan seberapa antusias dan dukungan

para pelaksana kebijakan terhadap program atau kebijakan tersebut. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis.

Dalam rangka terlaksananya Kebijakan KIA, pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi memiliki semangat yang tinggi, hal ini terlihat dari semangat pegawai saat melakukan tugasnya. Namun agar program program KIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka dibutuhkan dukungan dari semua pihak agar dapat berjalan dengan lancar.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan guna mencapai tujuan. Keberadaan struktur juga membantu dalam menentukan batas kerja dalam menjalankan tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Adapun yang termasuk dalam struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian tanggung jawab. Kewenangan yang dimaksud adalah kekuasaan mendapatkan keabsahan atau legitimasi.

Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan suatu keputusan. Kewenangan merupakan kekuasaan dan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan ini jika tidak diberi kewenangan dalam melaksanakan kebijakan maka tidak akan terlaksana secara efektif

Indikator Struktur Birokrasi sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Dalam melaksanakan Program KIA. Disdukpencahil Kabupaten Kuantan Singingi telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program KIA yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi sangat dibutuhkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dinilai telah terlaksana, namun belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari jumlah sumber daya manusia dalam Implementasi Kebijakan dinilai masih kurang. Disamping itu kesadaran masyarakat untuk mengurus KIA masih rendah.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam akhir penelitian ini antara lain ;

1. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan agar dapat menambah jumlah pegawai yang khusus menangani KIA agar pelayanan dan sosialisasi bisa terlaksana secara maksimal.
2. Menambah jumlah mesin cetak KIA.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: IKAPI.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Herman, Rosmita, Idham, R. (2022). Pemberdayaan masyarakat suku talang mamak dalam budidaya madu kelulut di kawasan taman nasional bukit tiga puluh indragiri hulu. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 6(1), 85-102.
- Ndraha, Taliziduhu 2003. *Kybemology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo.
- Nuraplina, P., & Herman, H. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek li Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 299-318.
- Purnomo, D. & Herman, H. (2022). Implementasi Pendistribusian Zakat Melalui Program Siak Sejahtera Oleh Badan Amil zakat nasional kabupaten siak (Study Penelitian Kecamatan Koto Gasib). *Jurnal kemunting*, 3(2), 830-853.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo dan Sugianto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Thoha, Miftah. 2012. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan ModelModel Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Kasus)*.PT. Buku Seru: Jakarta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Syaprianto. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. *Wedana*, IV(1), 439–444.

Peraturan Perundang- Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia, nomor 24 tahun 2013 tentang: Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang Republik Indonesia, nomor 35 tahun 2014 tentang: Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, nomor 2 tahun 2016 tentang: Kartu Identitas Anak.